

STUDI KEBIJAKAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN SUMBAR SAKATO DALAM MENGHADAPI UU SJSN DAN BPJS TAHUN 2013

**CH.TUTY ERNAWATI
UPTD BKIM SUMBAR**



Latar Belakang

- UU 40/ 2004 tentang SJSN, UU BPJS, PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan .
- Masih banyak masyarakat yang belum tertampaung dalam kuota jamkesmas .
- Tahun 2007 mengembangkan Jamkesda dg dengan Pergub 40 /2007 ,41 /2007 tentang petunjuk pelaksanaan Jamkesda dengan Bapel PT Askes & PT Sanjung Husada Mandiri

Latar Belakang

- Premi 10.000/orang/bulan (2007 – 2011) dengan dana sharing APBD prov dan APBD kab/kota
- Hak Inisiatif DPRD , sehingga mengesahkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato

Masalah yang banyak ditemui ,

- Beberapa kabupaten/kota masih mempunyai sistem jaminan kes daerah berbeda
 - Keterbatasan anggaran dari kab/kota
 - Manfaat pelayanan kesehatan masih dibatasi
 - Masih ada maskin/mendekati miskin belum mendapatkan jamkesda
- 

Lanjutan.....

- PPK masih banyak yang menolak peserta jamkesda karena berbagai alasan (tidak sesuai Prosedur)
- Tim Koordinasi Jamkesda belum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan permasalahan yang ada, di lakukan studi pelaksanaan kebijakan jamkesda Sakato dalam menyikapi UU BPJS di Sumatera Barat Tahun 2013.

Tujuan Penelitian

Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Tahun 2013.

Metode:

Pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus.

Pengumpulan data dilakukan di Dinas Kesehatan Prov/Dinas Kesehatan Kab/Kota terpilih, PT Askes, Pemda/ Bappeda, PPK.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen

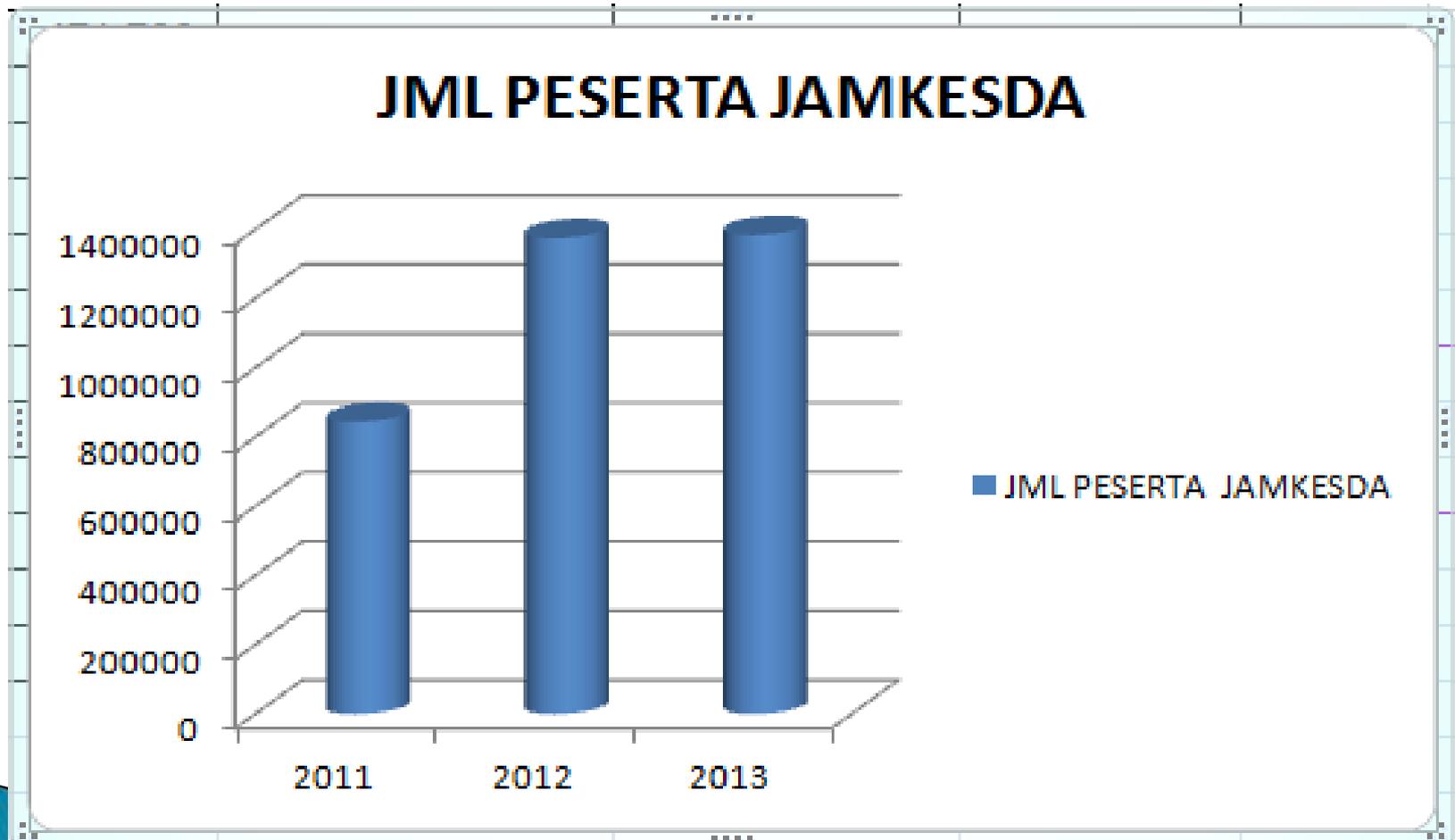


HASIL PENELITIAN (1)

Perda Jamkes Sumbar Sakato di syahkan
November 2011

- Peserta jamkesda , setiap orang yang belum mempunyai jaminan kesehatan, berdomisili di Provinsi Sumatera Barat dan jumlah peserta jamkesda s/d Tahun 2013 sebesar 24,90 % Total sebelumnya 6,1 % .
- Penduduk Sumbar mempunyai jamkes mencapai 67,07 % . (Askes PNS, Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek, dll)

Perkembangan Jumlah Jamkesda Prov Sumbar Tahun 2007 – 2013

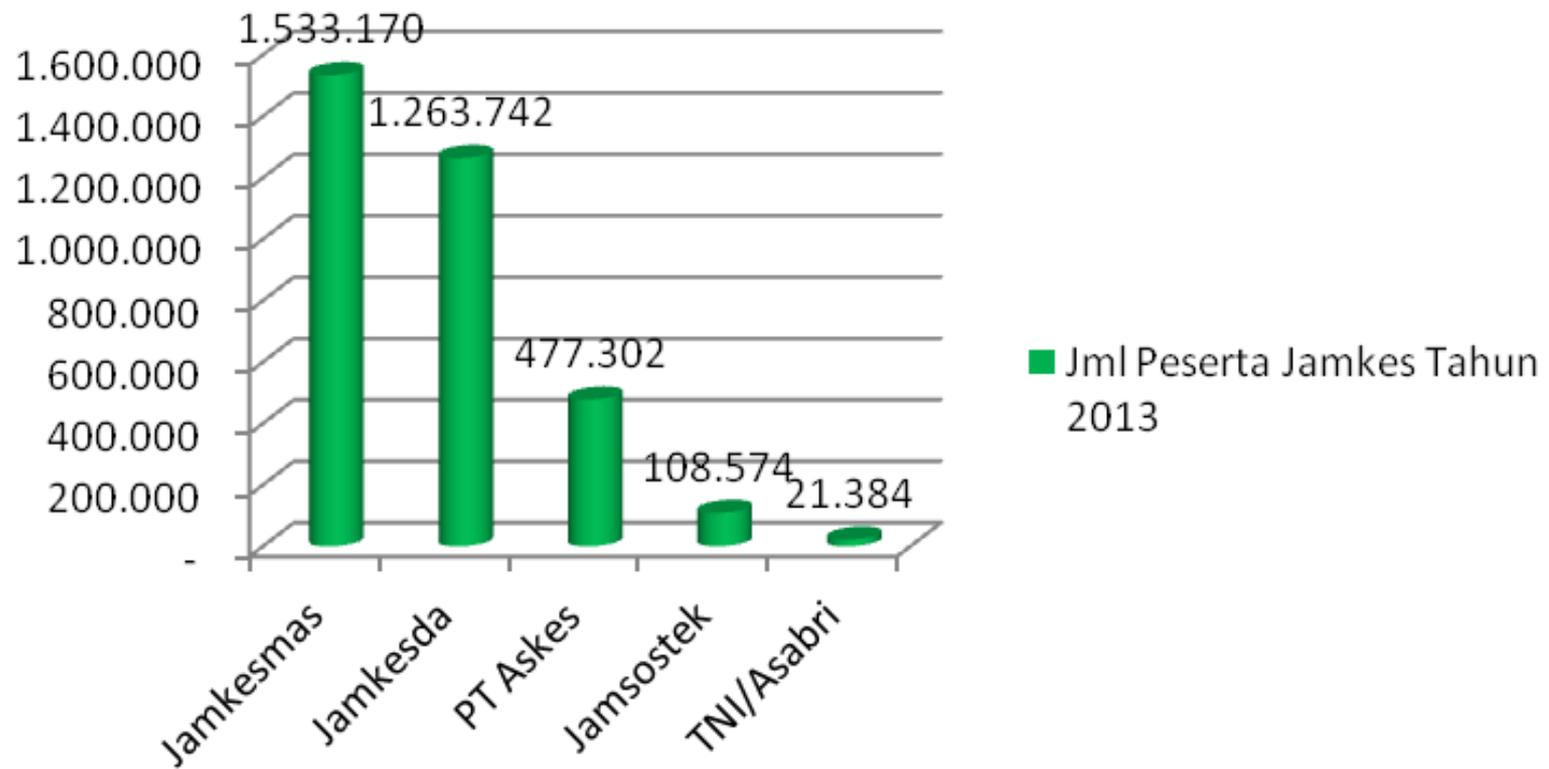


Hasil Penelitian (2)

- ▶ Kepesertaan diatur Pergub no 41 tahun 2013
 - ▶ Peserta di tetapkan oleh Bupati/Walikota setempat.
 - ▶ Penanggung jawab validasi data belum tertuang pada pegub
 - ▶ Masih banyak ditemui maskin yg belum mendapat jamkesda.
 - ▶ Solusinya harus ada Instansi yg bertanggung jawab dan penataan kembali dalam rangka Toral Coverage 2015
- 

Jumlah Peserta jamkes sesuai jenis Jaminan Kesehatan Tahun 2013

Jml Peserta Jamkes Tahun 2013



HASIL PENELITIAN (3)

- Pembiayaan Jamkes Sumbar sakato berasal dari APBD Propinsi dan APBD kabupaten /Kota dengan sharing Dana 40 % dan 60 % .
Menjadi satu Rekening di Bapel (PT Askes)
- Premi sebesar Rp. 6.000/bulan/orang
- Dana mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi msh belum berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan dan manfaat masih terbatas, dan msh ada iur biaya

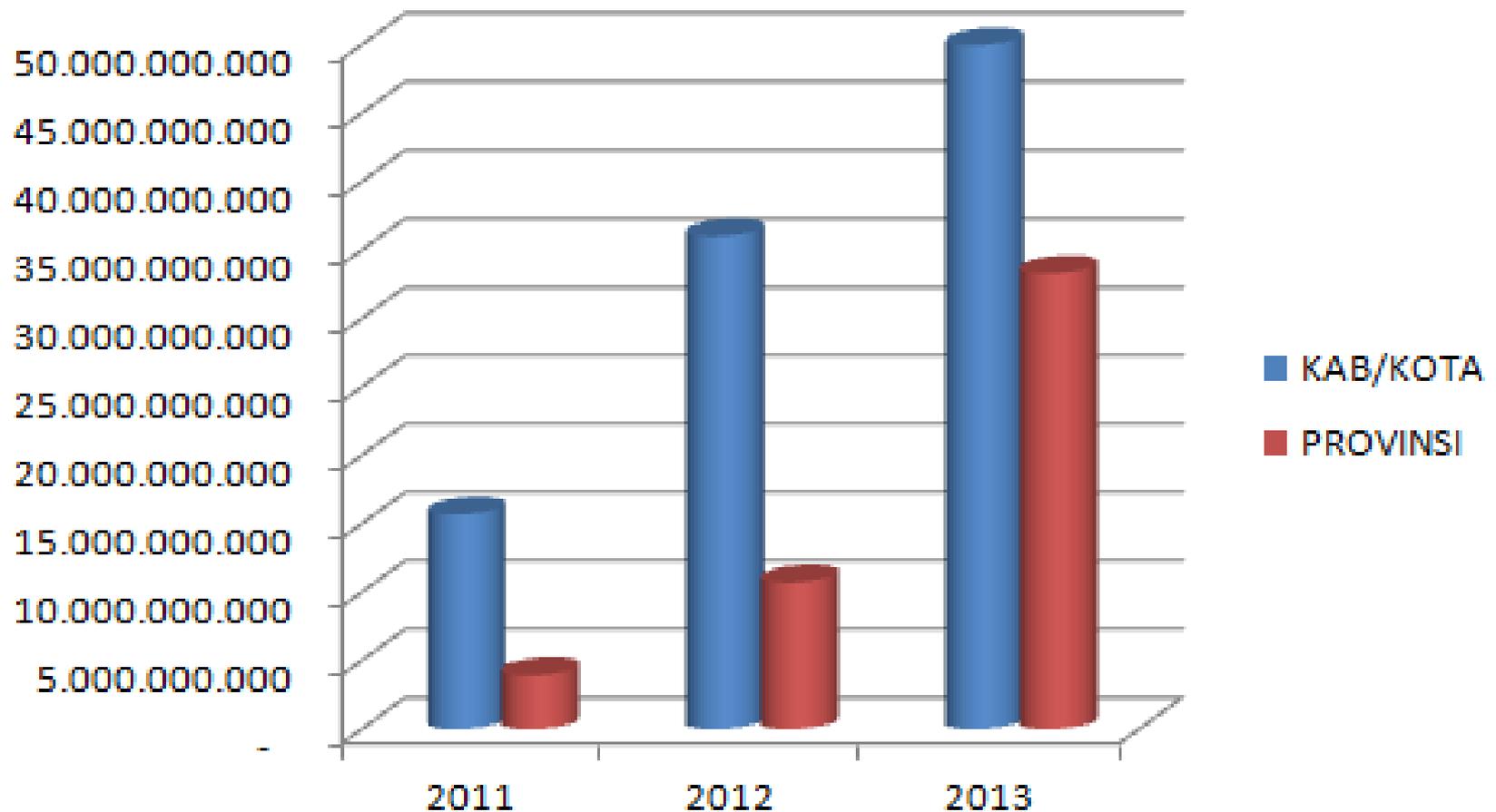
Hasil penelitian (4)

- ▶ Renacana akan dinaikan premi menjadi 12.000/orang/bulan pada bulan Oktober 2013
- Jika defisit pada anggaran, Kabupaten /Kota wajib membayar kekurangan pada Anggaran Perubahan atau APBD Tahun berikutnya. dan Bapel / PT Askes tetap melayani peserta sampai perhitungan kembali kekurangan / defisit tersebut oleh Pemda kabupaten / Kota.
- Solusi nya ditinjau kembali premi dan manfaat yankes

Hasil Penelitian (5)

- ▶ Sistem Pembayaran di PPK I dg Kapitasi dan PPK II dengan sistem Klaim (Pergub 91 /2012)
- ▶ Puskesmas tidak boleh menerima langsung dana dari pihak lain dan harus di setor ke daerah sesuai mekanisme daerah
- ▶ Solusinya adalah Puskesmas harus mengusulkan ke Dinkes Kab/Kota untuk dapat mengusulkan melalui rencana Kerja Anggaran

Perkembangan Anggaran Jamkesda Prov Sumbar Tahun 2011 - 2013



Hasil Penelitian (6)

Pengoragnisasian

- ▶ Belum berfungsinya Tim money Jamkesda krn belum ditetapkan SK oleh Gubernur sesuai tertuang pada Perda 10 /2011
- ▶ Segera ditetapkan dengan SK Gubernur dalam rangka money pelaksanaan jamkesda Sumbar sakato

Hasil Penelitian (7)

PPK dan manfaat pelayanan kesehatan

- ▶ Jenis Pelayanan

 - Rawat jalan tingkat dasar di Puskesmas

 - Rawat Jalan tingkat lanjutan

 - Rawat Inap tingkat lanjutan di Ruang rawatan kelas III

Hasil Penelitian (8)

PPK Jamkes Sumbar Sakato terdiri dari :

- ▶ Dokter keluarga
 - ▶ Puskesmas dan jaringannya
 - ▶ RSUD / RS Khusus milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, RS UPTD Pusay di Wilayah Sumbar
 - ▶ PPK lain yang memenuhi syarat pelayanan Jamkes Sumbar Sakato
- 

- ▶ PPK yang bekerjasama masih terbatas di Sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat,
 - ▶ Pasien peserta Jamkesda yang memerlukan rujukan ke RS yang lebih tinggi masih harus mendapat rekomendasi dari Pemda setempat,
 - ▶ belum sesuai dengan prinsip portabilitas dalam jaminan kesehatan
- 

Hasil Penelitian (9)

Masalah-masalah yang ada di PPK

- Rasio Puskesmas dg penduduk masih ada beberapa kab yang di bawah rata-rata prov
 - Rasio Tenaga Kesehatan (strategis) masih ada beberapa Kab yg di bawah rata-rata Prov
- 

Solusi :

- Memperluas faskes swasta
 - Tidak membatasi wilayah
 - Faskes dan tenaga di prioritas pada Kab yg bermasalah.
- 

Hasil Penelitian (10)

Kesiapan daerah dalam pelaksanaan UU SJSN & UU BPJS tahun 2014 (dana, Sarana / prasana Yankes, SDM).

- Peningkatan sarana & prasarana pelayanan kesehatan
- Peningkatan kualitas & kuantitas SDM di PPK (Puskesmas dan Rumah sakit)
- Ketersediaan obat, penunjang medik, dan alkes

Hasil Penelitian (11)

Kesiapan daerah dalam pelaksanaan UU SJSN & UU BPJS tahun 2014 (dana, Sarana / prasana Yankes, SDM).

- Penataan pelayanan kesehatan terstruktur & berjenjang
- Peningkatan Standar Pelayanan Medik & Alkes

Kesimpulan

- ▶ Pelaksanaan Kebijakan Jamkes Sumbar Sakato sudah dilaksanakan, dan masih perlu perbaikan dan koreksi , ada beberapa pernyataan saling bertentangan
- ▶ Kepesertaan Jamkes Sumbar sakato, cara pemilihan peserta dilakukan dari tingkat kelurahan/desa/jorong atau button up.

Kesimpulan

- ▶ belum ada dinas yang bertanggung jawab pendataan hal ini sesuai dengan Pergub hanya berbunyi pendataan dan validasi data menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dan fakta dilapangan masih banyak maskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan daerah.
- ▶ Premi masih rendah dan fakta dilapangan maskin masih iur biaya

Kesimpulan

- ▶ Kesiapan menghadapi UU BPJS dan Universal Coverage di Sumbar diperlukan keseriusan dalam hal , pemetaan /pendataan ulang peserta jamkesda, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk obat-obatan, pemerataan tenaga kesehatan yang strategis, dan menata kembali pelayanan kesehatan yang terstruktur dan berjenjang.

Saran

- ▶ Perlunya dievaluasi kebijakan yang terkait dengan Jamkesda Sumbar Sakato, agar antara kebijakan-kebijakan atau peraturan yang ada tidak saling bertentangan.
 - ▶ Adanya dukungan yang kuat dari Pemda selain dana juga dalam pelaksanaan dengan membentuk Tim Monev sehingga semua pihak mempunyai rasa tanggung jawab bersama
- 

saran

- ▶ Perlu ketegasan pemangku kebijakan agar semua fasilitas kesehatan khususnya fasilitas kesehatan Swasta ikut berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu sebagai PPK yang akan bekerjasama dengan BPJS untuk menghadapi berlakunya UU BPJS pada 1 Januari 2014
- 

Terima Kasih

